

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era *Society 5.0*, transformasi digital sangat krusial dalam tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan inklusivitas melalui integrasi teknologi canggih. Transformasi digital adalah pemanfaatan teknologi untuk tingkatkan kinerja dan mencakup keseluruhan organisasi. Pada pemerintahan terbuka saat ini, transformasi tata kelola pelayanan publik tentu memerlukan keterlibatan aktif masyarakat diberbagai aspek, termasuk partisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi layanan publik guna memastikan aspirasi masyarakat serta kebutuhannya terpenuhi secara efektif (Afrilia et al., 2024).

Digitalisasi membawa perubahan cukup besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik, yang di mana saat ini masyarakat mengharapkan layanan cepat, mudah diakses, serta didukung oleh teknologi. Dalam kondisi ini mendorong perubahan besar pada transformasi pelayanan publik, sehingga menjadi lebih baik, efisien, dan efektif dalam praktiknya (Hadi et al., 2020). Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik.

Inovasi dalam pelayanan publik adalah sebagai suatu upaya untuk melakukan perubahan serta pembaharuan dalam sistem pemerintahan, yang memiliki tujuan

utama untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan pada masyarakat. Pada sektor publik, inovasi sangat dibutuhkan untuk pengembangan suatu pelayanan publik. Inovasi menjadi sebuah produk yang baru dengan sifat yang menggantikan cara lama (Kartika & Okta, 2022). Pelayanan publik menjadi salah satu tugas pokok pemerintah yang sangat penting, di mana pemerintah berperan sebagai entitas utama yang bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan berkualitas dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh serta berkelanjutan. Pelayanan publik secara fundamental mencakup beragam aspek, aksesibilitas, transparansi, efisiensi, responsivitas, dan pemenuhan kepuasan masyarakat (Juan et al., 2022). Melalui *e-government*, proses pelayanan publik dapat diselenggarakan secara terintegrasi, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, sesuai dengan arah kebijakan percepatan transformasi digital nasional (Majid, 2021).

Dalam konteks pelayanan publik, termasuk pelayanan publik di era digital, proses transformasi yang sedang berlangsung membawa implikasi signifikan terhadap dinamika tenaga kerja. Pemerintah dihadapkan pada tantangan untuk menginisiasi dan mengimplementasikan berbagai inovasi kebijakan dan program-program guna menekan tingkat pengangguran sekaligus meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi tuntutan dunia kerja yang semakin kompetitif. Inovasi-inovasi ini krusial karena dapat membuka akses yang lebih luas terhadap kesempatan kerja bagi masyarakat dan mempersiapkan mereka untuk lebih kompetitif dan memasuki dunia industri. Sesuai perspektif *New Public Governance*, penyelenggaraan layanan publik dipandang sebagai hasil kolaborasi

dan interaksi dalam jaringan antaraktor, di mana masyarakat bukan lagi penerima pasif, melainkan mitra aktif yang berpartisipasi pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi untuk memastikan aspirasi serta kebutuhan mereka terpenuhi secara efektif (Gaebler et al., 2019).

Disamping itu, angkatan kerja merupakan elemen kunci dalam Upaya mendorong kemajuan serta pembangunan nasional (Indriani, 2016). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Indonesia, terdeteksi jumlah angkatan kerja di Indonesia mencapai 153,05 juta orang pada periode 2023-2025. Hal tersebut didukung dengan pemberitaan yang dilansir pada Badan Pusat Statistik Indonesia, 2025 sebagai berikut:

Jumlah angkatan kerja berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2025 sebanyak 153,05 juta orang, naik 3,67 juta orang dibanding Februari 2024. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik sebesar 0,80 persen poin dibanding Februari 2024. ([Tingkat Pengangguran Terbuka \(TPT\) sebesar 4,76 persen. Rata-rata upah buruh sebesar 3,09 juta rupiah. - Badan Pusat Statistik Indonesia](#) diakses pada (Jumat, 17 Oktober 2025).

Berdasarkan deskripsi walaupun pertumbuhan ekonominya menunjukkan kemajuan cukup pesat, pemerintah tetap menghadapi hal rumit terkait peningkatan jumlah angkatan kerja, khususnya dalam hal mewujudkan lapangan kerja yang layak serta mengatasi masalah pengangguran (Yunianto, 2021). Peningkatan angka pengangguran dapat memberikan tekanan yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi pada negara. Sebagai negara berkembang, Indonesia dihadapkan pada tantangan rumit untuk mengatasi masalah pengangguran, yang memerlukan strategi dan kebijakan yang tepat untuk menciptakan lapangan kerja yang memadai serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Prasetyo et al., 2024). Dalam konteks ketenagakerjaan, kategori pengangguran meliputi beberapa kelompok masyarakat,

termasuk mereka yang masih belum memiliki pekerjaan, tengah aktif mencari lowongan kerja, atau sedang proses merencanakan usaha.

Pengangguran di Indonesia termasuk masalah serius yang menuntut perhatian pemerintah pusat maupun daerah. Pengangguran juga menjadi persoalan di tingkat daerah termasuk Provinsi Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu provinsi dengan jumlah penduduk tertinggi di Indonesia. Jawa Timur dihadapkan pada tantangan besar untuk mengurangi jumlah angka pengangguran serta meningkatkan kualitas tenaga kerja di daerahnya. Argumen tersebut dikuatkan oleh data di bawah ini.

Tabel 1. 1 Data TPAK dan TPT provinsi Jawa Timur (2021-2025)

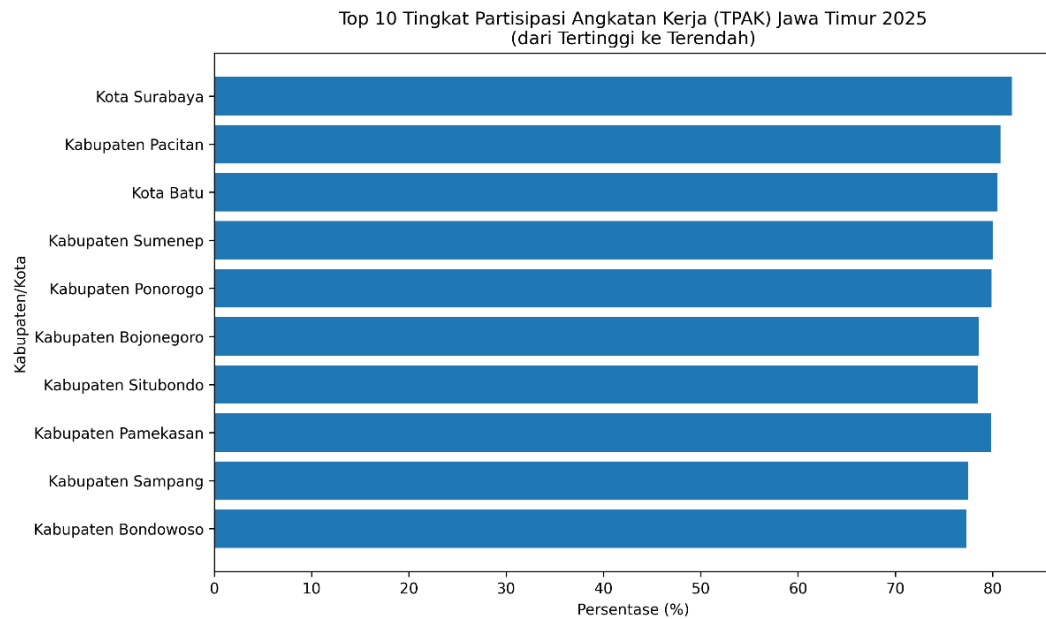
Tahun	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dalam %	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dalam %
2021	69,75	5,17
2022	70,99	4,81
2023	71,50	4,33
2024	73,02	3,74
2025	74,25	3,61

Sumber: Badan Pusat Statistik (2025) <https://jatim.bps.go.id/id/pressrelease/2025/11/05/1524/jumlah-angkatan-kerja-di-provinsi-jawa-timur-pada-agustus-2025-mencapai->

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Jawa Timur, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada 2025 74,25% atau 24,76 juta orang. Dari tabel tersebut, terlihat bahwa TPAK Provinsi Jawa Timur meningkat setiap tahun, sedangkan TPT menunjukkan tren penurunan yang stabil. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi perbaikan kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Timur di mana jumlah usia angkatan kerja semakin naik dan jumlah pengangguran semakin berkurang dalam kurung waktu 5 tahun terakhir.

Di tingkat provinsi Jawa Timur, upaya pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan ketenagakerjaan didukung oleh Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024, dengan peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan vokasi dan berbasis teknologi, serta Peraturan Gubernur No. 11 Tahun 2024. Peraturan ini mengatur pelaksanaan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kedua dasar hukum tersebut menegaskan bahwa peningkatan kompetensi tenaga kerja dan digitalisasi layanan menjadi agenda strategis daerah, sehingga penting untuk mengkaji kondisi ketenagakerjaan saat ini yang dapat dilihat melalui indikator seperti Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

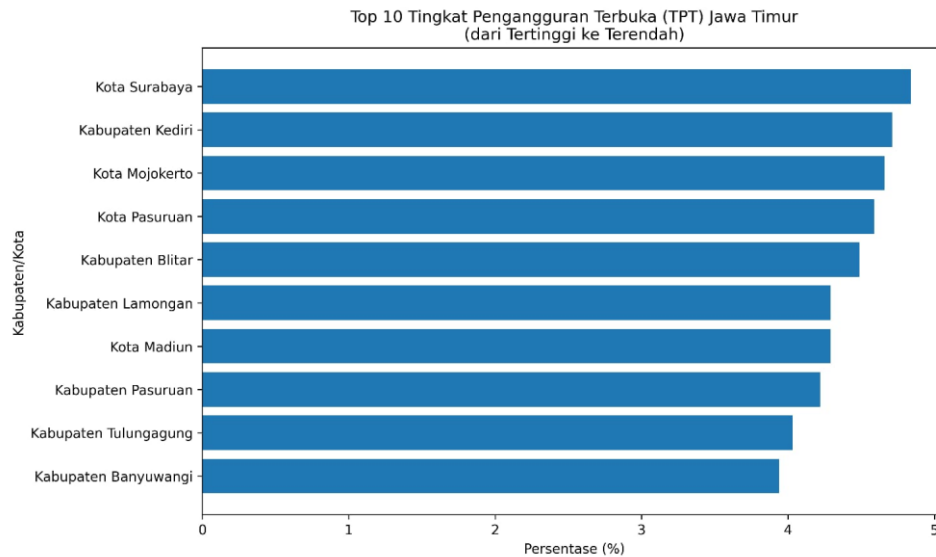
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di masing-masing kabupaten atau kota menunjukkan besarnya proporsi penduduk yang berada dalam rentang usia kerja dan secara aktif berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja. Partisipasi ini mencakup mereka yang sudah memiliki pekerjaan maupun mereka yang sedang mencari pekerjaan. Sedangkan untuk Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada setiap kabupaten atau kota menggambarkan persentase penduduk usia produktif yang tergolong dalam angkatan kerja, namun sampai saat ini belum mendapatkan pekerjaan (Martiazha & Kafabih, 2023). Dengan melihat penjelasan tersebut kita dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang keadaan ketenagakerjaan di berbagai wilayah di Jawa Timur. Selanjutnya, kondisi ini dapat dianalisis lebih mendalam menggunakan data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang akan disajikan berikut ini.



Gambar 1. 1 Diagram (TPAK) di Provinsi Jawa Timur Berdasarkan Kota/Kabupaten

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur (2025) <https://jatim.bps.go.id/id/statistcs-table/2/Mjc3IzI=/tingkat-partisipasi-angkatan-kerja--tpak--menurut-kabupaten-kota.html>

Berdasarkan data diagram Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Jawa Timur tahun 2025 di atas, Kota Surabaya memperlihatkan tingkat partisipasi angkatan kerja yang termasuk dalam kategori tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten dan kota lain di sekitarnya. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Surabaya mencapai sekitar 70,59 persen yakni 1,64 juta jiwa, yang menunjukkan partisipasi pekerja yang sedang hingga cukup aktif dalam pasar kerja wilayah tersebut. Meskipun Surabaya merupakan pusat aktivitas ekonomi, pendidikan, dan industri terbesar di Jawa Timur, tingkat partisipasi angkanya belum menempati posisi tertinggi di provinsi tersebut. Kondisi ini mencerminkan bahwa masih terdapat kelompok pemuda yang belum optimal terlibat dalam pasar kerja, baik karena keterbatasan keterampilan, akses informasi, maupun kesiapan kerja.



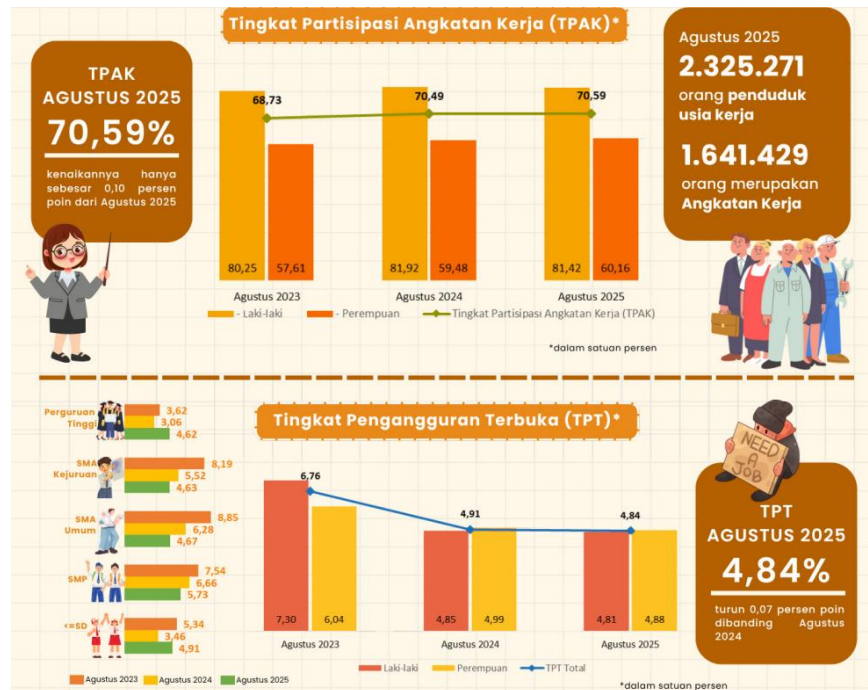
Gambar 1. 2 Diagram (TPT) di Provinsi Jawa Timur Berdasarkan Kota/Kabupaten

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur (2025) <https://jatim.bps.go.id/id/statistiks-table/2/NTQjMg==/tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--menurut-kabupaten-kota--persen-.html>

Berdasarkan diagram data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Jawa Timur tahun 2025 diatas, terlihat adanya perbedaan tingkat pengangguran antar daerah. Bahwa pengangguran Kota Surabaya tinggi dengan angka 4,84% yakni 683.842 orang, yang masih tergolong tinggi dibandingkan beberapa daerah lain yang memiliki TPT di bawah 3%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Surabaya merupakan pusat ekonomi dan industri, nyatanya hal tersebut tidak berbanding lurus dengan minimnya angka pengangguran. Sehingga permasalahan pengangguran masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian.

Meningkatnya jumlah angkatan kerja di Kota Surabaya seiring dengan pesatnya pertumbuhan industri menyebabkan persaingan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi dan harapan menjadi semakin ketat. Hal ini ditunjukkan dengan data BPS Provinsi Jawa Timur terkait dengan Meningkatnya

angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan menurunnya angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berikut ini.



Gambar 1.3 Diagram TPAK dan TPT Kota Surabaya

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surabaya (2025) <https://surabayakota.bps.go.id/id/pressrelease/2025/11/21/362/keadaan-ketenagakerjaan-kota-surabaya-agustus-2025.html>

Dari data diagram diatas dapat dilihat meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menjadi 70,59% dan menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) hingga 4,84%. Meskipun demikian, penurunan pada angka pengangguran tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kesiapan kerja pemuda Surabaya yang sesungguhnya. Pada kondisi ini memperlihatkan bahwa perbaikan angka statistik belum sepenuhnya diikuti dengan peningkatan kualitas angkatan kerja pemuda Kota Surabaya.

Meski mengalami penurunan pada indeks angka pengangguran, kenyataannya Surabaya masih tergolong tinggi angka penganggurannya jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Jawa Timur karena angka penduduk Kota Surabaya dengan usia produktif (15–59 tahun) dengan jumlah mencapai sekitar 2 juta jiwa atau sebesar 66,16% dari total populasi. Hal tersebut didukung dengan pemberitaan yang dilansir pada databoks.katadata.co.id sebagai berikut:

“ Pada 2024, mayoritas penduduk Kota Surabaya di dominasi oleh usia produktif (umur pada rentang 15-59 tahun) jumlahnya mencapai 2 juta atau 66,16% dari total populasi. Jumlah penduduk di Kota Surabaya tercatat 3,02 juta jiwa data per 2024. Selama lima tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan tahunan (CAGR) jumlah penduduk di wilayah ini sebesar 0,82%. Dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di provinsi Jawa Timur, jumlah penduduk Kota Surabaya merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lain, sementara jika dilihat menurut pulau, kabupaten/kota ini di urutan enam.”

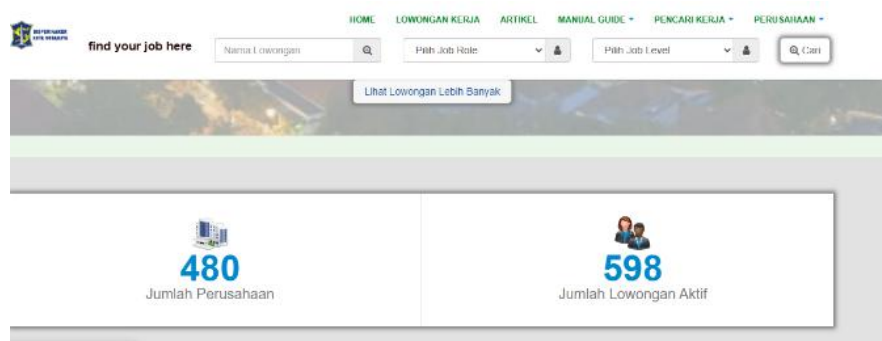
(<https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/c97354cd852ed9e/data-bps-2024-21-47-penduduk-kota-surabaya-masih-anak-anak> , diakses pada (Jumat, 17 Oktober 2025).

Berdasarkan deskripsi tersebut, diketahui memang angka pengangguran dengan jumlah penduduk yang tinggi akan menjadi sorotan pada dunia kerja karena semakin banyak penduduk usia produktif, semakin besar jumlah angkatan kerja yang perlu diserap pasar kerja. Keterbatasan kualifikasi angkatan kerja mengakibatkan daya saing dan kekuatan pada pasar kerja mereka menjadi rendah. Angkatan kerja belum mampu memenuhi standar serta kriteria yang diharapkan pada persaingan pasar kerja. Di pasar kerja global, dibutuhkan tenaga kerja yang mempunyai keterampilan prima, kualitas unggul, serta profesional dan bersertifikasi (Sinaulan, 2019). Surabaya dikenal sebagai pusat ekonomi dengan sektor dominan meliputi perdagangan besar dan eceran, industri pengolahan, serta jasa penyewaan dan konstruksi. Selain itu, sektor transportasi,

gudang, dan telekomunikasi juga sangat berkembang, menandakan pentingnya infrastruktur logistik di kota ini. Fokus Kota Surabaya dalam meningkatkan kompetensi ketenagakerjaan adalah melalui vokasi pelatihan industri agar sesuai dengan kebutuhan industri yang terus (DPM, 2025).

Pemerintah Kota Surabaya, melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kota Surabaya, mengambil peran esensial sebagai instansi pemerintahan yang fokus terhadap pelayanan masyarakat. Dalam kapasitasnya ini, Disperinaker memiliki fungsi sebagai wadah yang menghubungkan antara para pencari kerja dengan perusahaan, terkhusus bagi yang berdomisili KTP Surabaya untuk peluang kerja perusahaan yang ada di Surabaya (Martiazha & Kafabih, 2023). Disperinaker Kota Surabaya di tahun 2022 telah mengimplementasikan langkah digitalisasi guna mengatasi pengangguran dengan meluncurkan aplikasi ASSiK (Arek Suroboyo Siap Kerjo) Walikota Surabaya, Eri Cahyadi, sebuah platform berbasis website *Link and Match* yang dirancang untuk mengurangi jumlah angka pengangguran di Kota Surabaya. Website ini bukan hanya memudahkan masyarakat mengakses informasi lowongan kerja, serta dapat membantu perusahaan mendapatkan tenaga kerja yang sesuai kebutuhan perusahaan. Dengan kehadiran website oleh disperinaker ini, diharapkan dapat membantu masyarakat untuk mencari pekerjaan serta menjadi bukti atas ketersediaan pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik sebagai website siap kerja (Melywuni & Hertati, 2023). Inovasi pengembangan ASSiK memiliki landasan kuat pada, Peraturan Walikota Surabaya No. 76 Tahun 2021. Peraturan ini terdapat uraian tugas, fungsi, serta tata kerja Disperinaker Kota Surabaya secara komprehensif. Khususnya pada

Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, sebagai salah satu satuan kerja di Disperinaker Kota Surabaya. Berlandaskan peraturan ini, pengembangan ASSiK difokuskan untuk mendukung tugas dan fungsi Disperinaker Kota Surabaya untuk meningkatkan pelayanan publik (Sembiring & Prathama, 2025). Berikut tampilan awal dari website ASSiK.



Gambar 1. 4 Tampilan Webstie ASSiK

Sumber: disnaker.surabaya.go.id <https://disnaker.surabaya.go.id/one>

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa data dari jumlah Perusahaan dan lowongan kerja pada website ASSiK sangat transparan. Gambar tersebut menunjukkan tampilan awal ketika ingin mendaftar maupun login pada website ASSiK. Tampilan website menunjukkan tingginya antusiasme perusahaan yang berkolaborasi melalui platform oleh Disperinaker untuk mendapatkan karyawan yang sudah siap bekerja sesuai keahlian. Tetapi dilihat dari antusiasme tersebut belum disertai dengan tingkat kesiapan partisipasi masyarakat yang besar. Berdasarkan hasil wawancara pendahuluan dengan staf Disperinaker bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, sebagian besar pengguna hanya melakukan pendaftaran tanpa benar-benar mengajukan lamaran (*apply*) pada lowongan yang tersedia. Rendahnya tingkat keterlibatan ini menunjukkan bahwa

kolaboratif yang terjalin antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat pada pelaksanaan program belum berjalan secara optimal.

Dalam hal ini untuk menunjukkan bentuk penerapan kolaborasi dalam Program ASSiK, berikut data terkait jenis dan sektor pekerjaan yang ditawarkan lewat Program ASSiK. Data ini menggambarkan beragam peluang kerja bagi pemuda Surabaya, sekaligus potensi penyerapan tenaga kerja dari berbagai lapangan usaha.

Tabel 1. 2 Jenis Bidang pekerjaan Program ASSiK Kota Surabaya

Bidang Pekerjaan	Contoh Posisi	Keterangan
Teknik & Otomotif	Montir, teknisi kendaraan, operator bengkel	Bursa Kerja ASSiK menampilkan lowongan teknik otomotif dari perusahaan lokal Surabaya
Jasa Kecantikan & Kreatif	Makeup artist (MUA), staf salon, pekerja jasa kreatif	Lowongan ASSiK memuat posisi jasa kecantikan dari pelaku usaha lokal
Teknologi Informasi & Digital	Admin IT, pengelola media sosial, staf digital marketing	Aplikasi ASSiK menyediakan lowongan bidang digital dari perusahaan Surabaya
Administrasi & Sumber Daya Manusia	Staf administrasi, HRD, back office	Pemerintah Kota Surabaya melaporkan perusahaan membuka berbagai posisi administrasi melalui ASSiK
Perdagangan, UMKM & Retail	Sales, kasir, staf toko, marketing lapangan	ASSiK mencatat keterlibatan UMKM dan sektor perdagangan dalam penawaran kerja lokal
Logistik & Pergudangan	Kurir, staf gudang, operator logistik	Lowongan ASSiK menampilkan posisi logistik dari perusahaan distribusi di Surabaya
Industri Manufaktur & Produksi	Operator produksi, quality control, teknisi pabrik	Pemerintah daerah menyebut sektor manufaktur sebagai penyerap tenaga kerja melalui ASSiK
Jasa & Hospitality	Pramusaji, staf hotel, barista, layanan pelanggan	Bursa kerja ASSiK memuat lowongan sektor jasa dan perhotelan di Surabaya
Keuangan & Akuntansi	Staf keuangan, administrasi keuangan, akuntan junior	ASSiK menampilkan lowongan bidang keu

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya 2026 (data diolah oleh peneliti)

Berdasarkan data dari Disperinaker Kota Surabaya yang diolah oleh peneliti dari informasi Program ASSiK, perusahaan-perusahaan di Kota Surabaya menawarkan lapangan kerja di berbagai sektor, seperti teknik dan otomotif, jasa

kecantikan serta industri kreatif, teknologi informasi, administrasi beserta manajemen SDM, perdagangan dan UMKM, logistik, manufaktur, jasa hospitality, hingga keuangan serta akuntansi. Keragaman sektor ini menggarisbawahi bahwa ASSiK sengaja dibuat untuk menjembatani kualifikasi pemuda dengan tuntutan pasar kerja lokal.

Kolaborasi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kota Surabaya dengan pihak swasta serta masyarakat pada Program ASSiK dapat dimengerti dengan konsep *Co-Production*. Penerapan *Co-Production* sangat penting untuk memastikan kebijakan pemerintah mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. *Co-production* adalah proses kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pemberian layanan publik, di mana keduanya memiliki tanggung jawab bersama untuk mencapai hasil yang optimal. Melalui kerja sama ini, tercipta nilai tambah dan kualitas layanan yang lebih baik, serta masyarakat dapat terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan, sehingga hasilnya lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan mereka (Asmoro&Imron, 2019). Oleh karena itu, Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kota Surabaya berperan sebagai penyedia yang mendorong kolaborasi antara masyarakat dan dunia usaha untuk meningkatkan kompetensi, memperluas peluang kerja, serta mengurangi angka pengangguran di Kota Surabaya guna mewujudkan kesiapan kerja pemuda usia produktif.

Permasalahan rendahnya *Co-Production* dalam program ASSiK tentu menjadi isu yang penting untuk diteliti. Walaupun program ASSiK sangat berperan positif mengurangi pengangguran dan mewujudkan kesiapan kerja usia produktif

bagi pemuda Surabaya sesuai yang dibutuhkan perusahaan, realita yang ada menunjukkan berbagai permasalahan yang menghambat keterlibatan masyarakat dalam partisipasinya. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah pendaftar yang terekam pada aplikasi ASSiK masih berada diangka 38,493 ribu, Hal ini belum menunjukkan adanya signifikansi atau dominan pendaftar dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja mencapai 1,62 juta orang (Santoso, 2025). Hal tersebut menunjukkan bahwa program ASSiK masih belum tersebar secara menyeluruh atau belum benar-benar efektif berjalan dikarenakan minimnya sosialisasi. Hal ini selaras dengan hasil wawancara yang penulis lakukan bersama salah satu staff dari Disnaker bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Kota Surabaya yaitu Bapak Radiansa, beliau menyampaikan bahwa:

“.....pada program ASSiK ini jumlah pendaftar memang setiap tahunnya bisa dikatakan terus bertambah, namun bisa dilihat dari sistem kami bahwa tidak semua yang mendaftarkan akunya pada ASSiK ini selalu apply lowongan. Waktu awal peluncuran ASSiK pihak Dinas hamper setiap hari sosialisasi secara bergantian, tetapi memang sudah jarang dilakukan di beberapa waktu terakhir ini. Untuk sekarang menunggu dari beberapa pihak meminta kami sosialisasi program ASSiK....” (hasil wawancara pendahuluan 21 Oktober 2025)

Dilihat dari hasil wawancara di atas menunjukkan masih rendahnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi pada program ASSiK dalam penerapan *Co-Production* disebabkan beberapa faktor utama. Pertama, dikarenakan kegiatan sosialisasi penggunaan website ASSiK yang telah dilakukan belum sepenuhnya menjangkau semua lapisan Masyarakat. Kedua kolaborasi antara pemerintah, pemuda, dan perusahaan belum seimbang, hal ini dibuktikan pada wawancara pendahulu yang penulis lakukan bersama staff Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya yaitu bapak Slamet, beliau menyampaikan bahwa:

“..... Kerja sama yang terjalin masih sedang diusahakan dan tingkatkan yakni antara kerja sama dengan perusahaan, karena masih ada beberapa perusahaan banyak maunya. Kemudian dengan masyarakat yang masih malas atau mengabaikan lowongan kerja bagus.....” (hasil wawancara pendahuluan 21 Oktober 2025)

Dilihat dari wawancara di atas menunjukkan bahwa masih belum seimbang kolaborasi yang dilaksanakan. Ketiga sebagian warga masih ada yang terkendala pada server website ASSiK yang terkadang mengalami trouble atau gangguan, hal itu dilihat dari keluhan masyarakat yang disampaikan dikolom komentar media sosial Disnaker Kota Surabaya bahwa desain platform ASSiK dinilai masih kurang *user-friendly* sehingga masyarakat masih mengalami kesulitan dalam mengakses layanan. Hal tersebut dibuktikan dengan gambar berikut :



Gambar 1. 5 Komentar di sosial Media Permasalahan Website ASSiK

Sumber: Akun Instagram Disperinaker Kota Surabaya,2025

Berdasarkan visualisasi pada *website* ASSiK terlihat pada kolom komentar sosial media adanya permasalahan pada *error system website*. Ketiga faktor tersebut yang mengakibatkan rendahnya partisipasi Masyarakat lokasi dan pemuda dalam memaksimalkan program ASSiK. Sehingga hal ini berdampak pada aspek kolaborasi publik yang belum sesuai dengan prinsip *co-production*. Pada hal ini

disesuaikan berdasarkan kajian terhadap studi-studi sebelumnya, yang teridentifikasi sejumlah celah penelitian (*research gap*) yang relevan dengan penelitian Program Arek Suroboyo Siap Kerjo (ASSiK).

Penelitian Novanti & Meirinawati (2024) yang berjudul “Inovasi Pelayanan Publik Melalui Aplikasi Berbasis *Website Link and Match* ASSiK (Arek Suroboyo Siap Kerjo) di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya“ berfokus pada inovasi pelayanan publik berbasis aplikasi ASSiK, khususnya menyoroti isu teknis sistem, pengelolaan aplikasi, serta kualitas desain dan fitur layanan. Walaupun menyajikan gambaran empiris tentang hambatan implementasi aplikasi, studi tersebut belum mengeksplorasi secara mendalam peran aktor non-pemerintah dalam seluruh siklus penyelenggaraan pelayanan publik.

Selanjutnya, studi Melywuni & Hertati (2023) dengan judul “Efektivitas Aplikasi Arek Suroboyo Siap Kerjo (Assik)” mengevaluasi efektivitas aplikasi ASSiK dalam mengurangi tingkat pengangguran di Kota Surabaya. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa program tersebut cukup berhasil dari sisi outcome, tetapi masih menghadapi tantangan berupa kurangnya pemahaman pengguna dan masalah teknis sistem. Penelitian ini belum menjadikan partisipasi pemuda serta pelaku usaha sebagai variabel utama dalam menjelaskan efektivitas layanan, dan belum menerapkan kerangka teoretis *co-production* untuk menganalisis interaksi antara pemerintah dan pengguna layanan.

Kemudian pada studi Barbera (2023) dengan judul “*Monetary and symbolic rewards: do they matter for fostering co-commissioning and co-delivery of public services*” dan Nazla (2023) dengan judul “Strategy Digital Melalui *Co-Production*

Di Samsat Wilayah Kabupaten Bandung 1 Rancaekek “ telah meneliti penerapan *co-production* dalam pelayanan publik pada sektor berbeda, seperti administrasi dan perpajakan. Kedua studi tersebut menyoroti tantangan kelembagaan, prosedural, serta partisipatif dalam *co-production*, tetapi belum secara khusus menghubungkan pendekatan ini dengan program ketenagakerjaan digital maupun kesiapan kerja pemuda. Oleh karena itu, masih ada keterbatasan penelitian yang mengintegrasikan teori *co-production* dengan konteks kebijakan ketenagakerjaan lokal.

Sementara itu, studi Muspawi & Lestari (2020) dengan judul “ Membangun Kesiapan Kerja Calon Tenaga Kerja” lebih berfokus pada kesiapan kerja individu calon tenaga kerja, tanpa menghubungkannya langsung dengan tata kelola program publik serta mekanisme partisipatif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Penelitian ini belum memposisikan kesiapan kerja sebagai *outcome* dari proses kolaboratif dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Berdasarkan seluruh kajian tersebut, diketahui bahwa belum ada penelitian yang secara komprehensif menganalisis Program ASSiK dengan pendekatan teori *Co-Production* oleh Nabatchi (2017), terutama melalui pengkajian empat dimensi utamanya, yakni *co-commissioning*, *co-design*, *co-delivery*, dan *co-assessment*. Celah penelitian ini menjadi landasan utama bagi studi lanjutan guna memperkaya literatur akademik serta praktik kebijakan publik di ranah ketenagakerjaan. Kebaruan penelitian ini berada pada penerapan teori *Co-Production* Nabatchi (2017) sebagai kerangka analisis utama untuk mengkaji Program Arek Suroboyo Siap Kerjo (ASSiK).

Penelitian ini menyajikan kebaruan dalam beberapa aspek. Pertama, studi ini tidak hanya mengevaluasi efektivitas program ASSiK dari perspektif *output* dan *outcome*, melainkan juga menganalisis proses kolaboratif antara pemerintah, pemuda, serta pelaku usaha sepanjang tahapan penyelenggaraan program, mencakup perencanaan bersama (*co-commissioning*), mendesain bersama (*co-design*), distribusi bersama (*co-delivery*), dan penilaian bersama (*co-assessment*). Kedua, penelitian ini memberikan perspektif baru dengan memposisikan kesiapan kerja pemuda sebagai *outcome* dari proses *co-production*, bukan hanya sebagai dampak langsung dari kebijakan pemerintah. Dengan hal tersebut kesiapan kerja dipandang sebagai konstruksi sosial yang terbentuk melalui interaksi, partisipasi, dan kolaborasi antara aktor pemerintah dan non-pemerintah. Ketiga, secara empiris penelitian ini memperkaya studi administrasi publik dengan bukti nyata penerapan *co-production* pada program ketenagakerjaan digital di pemerintah daerah, yang masih jarang dibahas di Indonesia. Temuan ini diharapkan jadi panduan untuk kebijakan ketenagakerjaan yang partisipatif dan berkelanjutan di daerah lain.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang tersebut penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi terbaru untuk pengembangan Program ASSiK, serta mengisi kesenjangan penelitian terkait penerapan *Co-Production*. Sehingga penulis tertarik untuk mengangkat penelitian ini dengan judul **“Penerapan *Co-Production* Dalam Program Assik (Arek Suroboyo Siap Kerjo) Untuk Mewujudkan Kesiapan Kerja Pemuda Pada Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kota Surabaya “.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah “bagaimana penerapan *co-production* dalam Program ASSiK (Arek Suroboyo Siap Kerjo) untuk mewujudkan kesiapan kerja pemuda Surabaya?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui, mengidentifikasi, dan mendeskripsikan penerapan *co-production* dalam program ASSiK (Arek Suroboyo Siap Kerjo) untuk mewujudkan kesiapan kerja pemuda pada Dinas perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya melalui kolaborasi multipihak.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, pada penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi banyak pihak, bagi penulis maupun pihak lainnya terutama kalangan akademisi dan masyarakat umum dapat mengetahui penerapan *co-production* dalam program ASSiK (Arek Suroboyo Siap Kerjo) untuk mewujudkan kesiapan kerja pemuda Surabaya.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, kajian, dan pemahaman mengenai bagaimana penerapan *co-production* dalam program ASSiK (Arek Suroboyo Siap Kerjo) untuk mewujudkan kesiapan kerja pemuda pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya.

1.4.2 Manfaat Praktis

a) Bagi Penulis

Hasil penelitian ini menjadi salah satu syarat mendapat gelar sarjana pada Program Studi Administrasi Publik , Fakultas Ilmu Sosial Budaya dan Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

b) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya, khususnya dalam mengoptimalkan Program ASSiK (Arek Suroboyo Siap Kerjo), sehingga kualitas layanan ketenagakerjaan semakin meningkat dan efektif dalam memenuhi kebutuhan kesiapan kerja pemuda Surabaya.

c) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya Kota Surabaya pada program ASSiK (Arek Suroboyo Siap Kerjo) untuk dapat mendorong pemuda lebih aktif dalam menggunakan layanan tersebut guna mempersiapkan diri memasuki dunia kerja.

d) Bagi Akademik

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pemahaman ilmiah terkait pelaksanaan program pelayanan publik ASSiK oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya dengan pendekatan berbasis *co-production*.